

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : The Biography Institute, 2007).

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Bhuna Ilmu Populer, 2007).

_____, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005).

Budiardjo, Mirian, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2005).

_____, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perbedaan & Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta : FH UII Pers, 2014).

Husen, La Ode, *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung : CV. Utomo, 2005).

Kusnardi, dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti", 1985).

Manggalatung, Salman, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amendemen UUD 1945*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2016).

Mario, Monteiro Josef, *Hukum Keuangan Negara & Daerah*, (Malang : Setara Pers, 2019).

Poernomo, Hadi, dkk, *Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Proses Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta : Sekjen BPK RI, 2012)

Soehino. *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 1989).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Soemitro, Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum & Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).

Suteki dan Gilang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok : Rajawali Pers, 2018).

Syamsudin, M, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2021).

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2010).

Jurnal

Benuf, Kornelius, “Politik Hukum Legislator dan Ideologi Pancasila”, *Gema Keadilan*, Vol.5, Edisi 1, September 2018. Halaman 85-91.

Ilalahi, Beni Kurnia dan M. Ikhsan Alia, “ Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK”, *Integritas*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2017. Halaman 37-78.

Jasa , Gilang Prama dan Ratna Herawati. Dinamika Relasi antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara. *Jurnal Law Reform*, Vol.13, No.2, Tahun 2017. Halaman 189-203.

Nasrudin , Tubagus Muhammad. “Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara di Bidang Pengawasan Keuangan Negara”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.05, No.01. Tahun 2020. Halaman 88-107.

- Nurtjahjo, Hendra, “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara)”, *Hukum dan Pembangunan*, Vol.32, No.3 Juli-September 2005. Halaman 275-287.
- Prabhawa, Wisnu dan Eko Prasjo, “Integritas Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Supreme Audit Institution”. *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2021. Halaman 1-17.
- Putra, Widhya Mahendra, “Perbandingan Konsep Pemilihan Jabatan Publik BPK atau SAI di Beberapa Negara untuk Mewujudkan BPK yang Independen”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19, No. 3, Tahun 2019. Halaman 385-403.
- Ruhenda, dkk, “Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia”, *Journal Of Governance and Social Policy*, Vol.1,No 2 Tahun 2020. Halaman 58-69.
- Tri, Mulyani, “Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undnag-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”, *Humani*, Vol.6, No.1, Januari 2016. Halaman 75-95.
- Umboh, Christiani Junita, “Penerapan Konspe Trias Politca Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol.VIII, No.1, 2020. Halaman 131-142.
- Wibowo, Ari , “Independensi Kejaksaan Dalam Sistm Peradilan Pidana Indonesia”, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol.12, No.1, Tahun 2015. Halaman 1-13.
- Yulistyowati, Efi, dkk, “Penerapan Konsep Trias Politca Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18, No.2, Tahun 2016. Halaman 328-338.

Tesis

Hamid, T, “*Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Yang Kewenangannya Tidak Bersumber Dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945*”, (Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016).

Laporan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2019*, (Jakarta, 2020).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020*, (Jakarta, 2021).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021*, (Jakarta, 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Pembentukan BPK menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 7 Tahun 1963 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Wawancara

AS, wawancara, BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, (Semarang : 27 Januari 2023).

Website

bbc.com, “*Penangkapan dalam Kasus Kemendes; Ada Apa dengan BPK*”,
(<https://www.bbc.com/indonesia/>, 30 Mei 2017).

Gabrillin, Abba, “*Dakwaan : Auditor BPK Terima Uang Proyek E-KTP*”,(<https://nasional.kompas.com/>, 9 Maret 2017).

Harijanti ,Susi Dwi, “*Sistem Ketatanegaraan UUD 1945*”,
https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_SISTEM%20KETATANEGARAAN%20BERDASARKAN%20UUD%201945.pdf.

www.bpk.go.id, “*Independensi Anggaran Sangat Penting Dalam Menunjang Independensi BPK*”, <https://www.bpk.go.id/news/independensi-anggaran-sangat-penting-dalam-menunjang-independensi-bpk>.

www.bpk.go.id, “*Kendala Audit Pajak Salah Satu Tantangan BPK*”,
<https://www.bpk.go.id/news/kendala-audit-pajak-salah-satu-tantangan-bpk>.

www.bpk.go.id, “*Nilai Dasar BPK Sebagai Landasan Pelaksanaan Tugas Para Pelaksana BPK*”, <https://www.bpk.go.id/news/nilai-dasar-bpk-sebagai-landasan-pelaksanaan-tugas-para-pelaksana-bpk>.

www.bpk.go.id, “*Pembatasan Audit Pajak Langgar Aturan Internasional*”,
<https://www.bpk.go.id/news/pembatasan-audit-pajak-langgar-aturan-internasional>.

www.dpr.go.id, “*DPR dan BPK Memiliki Hubungan Penting dalam Penyelenggaraan Negara*”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/9434>.

www.bpk.go.id, “*Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan*”,
<https://web.bpk.go.id/Pages/Sejarah.aspx>.